



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : lotk.wakatobi@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.171/LPTK/TU.210/IV/2024

Yth. Kepala Pusat Riset Kelautan
di Jakarta

Dengan ini kami kirimkan :

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja (LKj) LPTK Triwulan I Tahun 2024	1 (satu) Laporan	Dikirim dengan Hormat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Wakatobi, 18 April 2024
Plt. Kepala Loka,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aliruddin

Tembusan:

1. Kepala BPPSDMKP
2. Sekretaris BPPSDMKP



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Ketua : Penanggungjawab Kegiatan Kepala Urusan Umum
Anggota : Perencana
Pengelola Monitoring dan Evaluasi



Kegiatan Urusan Umum
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan I Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pengelolaan kinerja sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 terdiri atas a) perjenjangan kinerja; b) perencanaan Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pelaporan Kinerja; dan e) evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan bagian dari pelaporan Kinerja tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian pada periode Triwulan I Tahun 2024 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 17 April 2024

Pt. Kepala LPTK,



Aliruddin, ST

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugasnya Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) mempunyai visi, yaitu “Menjadi Inovator IPTEK Bidang Konservasi dan Pengawasan Untuk Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan menjalankan misi yaitu: (a). Menguasai iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (b). Menghasilkan iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan; (c). Menerapkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan iptek hasil litbang untuk kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2024 Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Pusat Riset Kelautan yang menetapkan target kinerja berupa 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.523.513.000,- (*empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Jumlah Indikator Kinerja ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.432.499.000,- (*empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). Adapun tambahan 2 (dua) Indikator Kinerja pada tahun 2024 adalah; 1) Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT LPTK (orang) dan 2) Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal).

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 106,66 sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Sesuai dengan dengan Rencana Aksi Tahun 2024 Pada Triwulan I Tahun 2024 dari 13 Indikator Kinerja (IK), terdapat 3 IK yang mempunyai target kinerja di periode tersebut. Ketiganya tersebut dicapai dengan IK berstatus baik $\geq 100\%$ Rincian target dan realisasi dari 3 IK tersebut adalah:

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 100%
2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan target sebesar 94% dengan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan persentase capaian 120%
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 82% dengan capaian sebesar 82% atau sama dengan persentase capaian 100%

Berdasarkan evaluasi kinerja periode Triwulan I Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja LPTK termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,66%, nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan NKO triwulan yang sama pada tahun 2023 yakni sebesar 103,26%.

Adapun rincian capaian untuk setiap IK pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN I		%
				TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1 Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033			
		2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0.5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82			
		7 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94			
		9 Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	82	82	100,00
		11 Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1			
		12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76			
		13 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Potensi dan Permasalahan	5
1.6. Sistematika Laporan	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	10
2.4. Pengukuran Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
1.1. Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024	14
1.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
1.3. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2024	27
BAB IV. PENUTUP	38
4.1. Capaian Kinerja Utama	39
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	41
Lampiran	42
- Perjanjian Kinerja	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2024	10
2. Alokasi Anggaran Tiap Rincian Output LPTK Tahun 2024	10
2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2024	11
3. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2024	15
4. Capaian Kinerja IK 4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan I Tahun 2024	18
5. Capaian Kinerja IK 9 Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan I Tahun 2024	23
6. Capaian Kinerja IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024.....	24
7. Pagu dan Realisasi Anggaran per RO Triwulan I Tahun 2024	27
8. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan I Tahun 2024	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	3
2. Komposisi SDM Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	4
3. Rincian PNS Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	4
4. Dashboard Kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan TW I Tahun 2024.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG**
- 1.2. TUJUAN**
- 1.3. TUGAS DAN FUNGSI**
- 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUASIA**
- 1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN**
- 1.6. SISTEMATIKA LAPORAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan laporan kinerja yaitu, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat terwujud.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2024.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

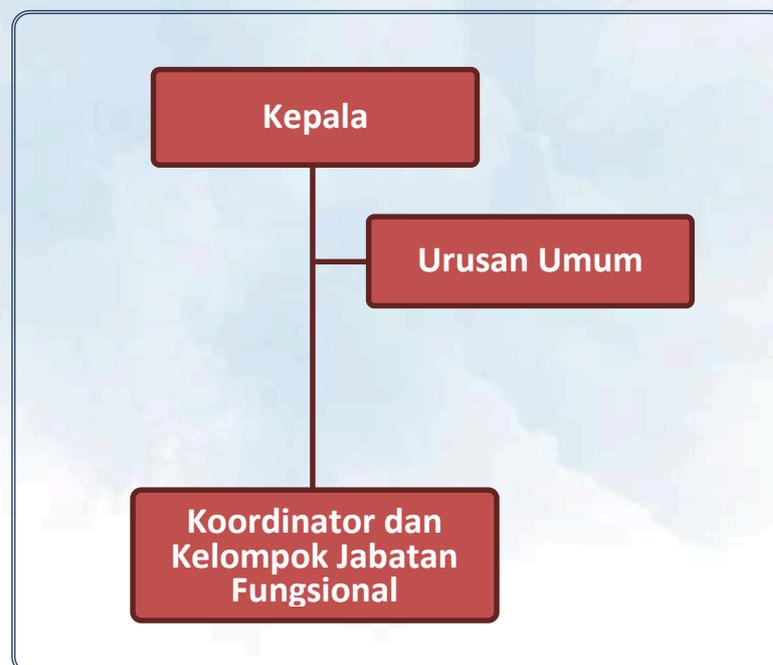
1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Perencanaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). LPTK memiliki tugas melakukan perencanaaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motlator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perencanaaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan perencanaaan dibidang alat dan mesin untuk

konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausaha.

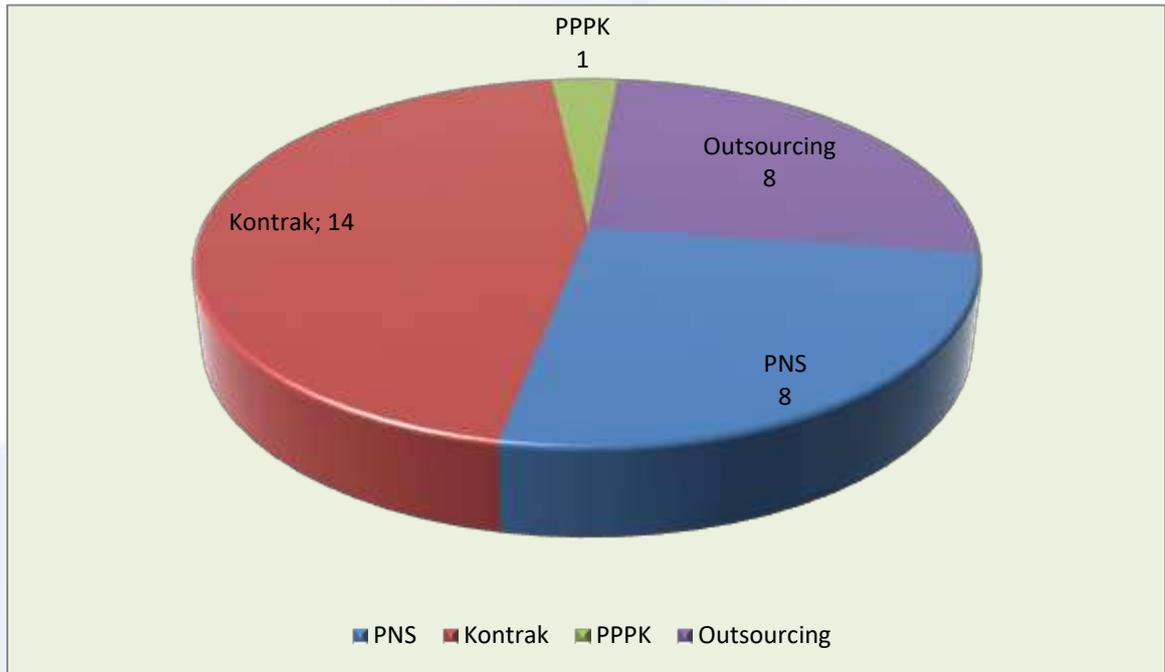
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Adapun struktur organisasi LPTK dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



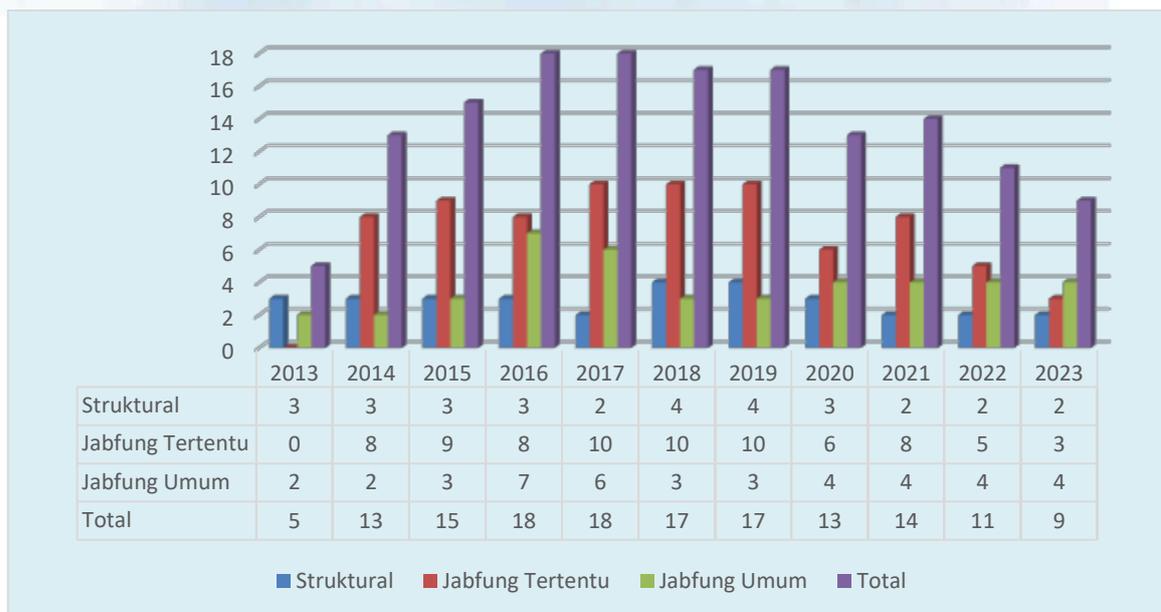
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8 (delapan) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 (satu) orang, pegawai kontrak sebanyak 14 (lima belas) orang dan Outsourcing sebanyak 8 (Delapan) Orang. Komposisi SDM LPTK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan



Gambar 3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

1.5. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki sebanyak 31 (tiga puluh satu) pegawai serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Perekayasaan Teknologi Kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan III Tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset pada tahun 2022 – 2023 ini hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dukungan manajerial. Sebelumnya LPTK dibawah koordinasi langsung oleh Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), namun setelah terbentuknya SOTK baru di lingkungan eselon II BPPSDM, LPTK kini dalam masa transisi ini LPTK dibawah koordinasi langsung dari Sekretariat BPPSDMKP sambil menunggu keputusan organisasi baru di tingkat UPT.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) triwulan I tahun 2024 terhadap rencana kinerja (performance plans) triwulan I tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan
2. Kata Pengantar, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala LPTK.
3. Ringkasan Eksekutif, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .
4. Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi
5. Bab II Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
- d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan; dan
- e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS**
- 2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2024**
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA**
- 2.4. PENGUKURAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020–2024, mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BPPSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020–2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BPPSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BPPSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perikanan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perikanan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perikanan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perikanan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perikanan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perikanan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNPB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perikanan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020–2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020–2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM dan KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BPPSDM dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BPPSDM dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- c. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, setiap sasaran strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IK).

Sasaran strategis pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- a. Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sektor industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- b. Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- c. Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- d. Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- e. Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SK-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- b. Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- c. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- d. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- e. Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Pusat Riset Kelautan yang menetapkan target kinerja berupa 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.523.513.000,- (*empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Anggran (Rp.)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	4.523.513.000
Total Anggaran Tahun 2024		4.523.513.000

Anggaran tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) Rincian Output sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran LPTK Tahun 2024 Tiap Rincian Output

NO	RINCIAN OUTPUT	VOLUME	ALOKASI ANGGARAN
1	2378.EBA.956 LAYANAN BMN	1 Layanan	10.000.000
2	2378.EBA.958 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	20.225.000
3	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	133.275.000
4	2378.EBA.963 LAYANAN DATA DAN INFORMASI	1 Layanan	1.500.000
5	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	4.163.513.000
6	2378.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	9 Layanan	25.000.000
7	2378.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1 Layanan	31.640.000
8	2378.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Layanan	39.345.000
9	2378.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Layanan	34.790.000
10	2378.EBD.974 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1 Layanan	64.225.000
Total			4.523.513.000

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2024 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Perjanjian Kinerja LPTK level 3 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2024 kementerian dan program BPPSDMKP.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2024 LPTK telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan ditandatangani oleh Kepala Pusriskel Bersama dengan Kepala LPTK pada Januari 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut,

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (Nilai)	94
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai IKPA LPTK (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

2.4. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja triwulan I tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada triwulan I tahun 2024 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

No.	Validitas IK	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IK. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X < 100%	X > 100%	X > 100% atau X < 100%	Buruk
X = 100%	X = 100%	-	Sedang
X ≥ 100%	X ≤ 100%	X = 100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TW I TAHUN 2024**
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**
- 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TW I TAHUN 2024**

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan TW I Tahun 2024

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja LPTK triwulan I tahun 2024 sebesar 106,66 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LPTK

Dari hasil pengukuran kinerja triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau. Pada tahun 2024, LPTK memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan 13 Indikator Kinerja (IK). Dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 terdapat 3 IK yang mempunyai target capaian realisasi yaitu: IK 4) Persentase Layanan Dukungan manajemen Internal LPTK (%) target 100% capaian 100% (100%); IK 9) Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) target 94 capaian 133,33 (120%); dan IK 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) target 82% capaian 82% (100%).

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu

penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan menunjukkan kinerja baik (mencapai target yang telah ditetapkan) yang ditandai dengan warna biru dan hijau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN I		%
					TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033			
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15			
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0.5			
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82			
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79			
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94			
		9	Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	82	82	100,00
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1			
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76			
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IK) pada triwulan I tahun 2024 yang mengacu Balanced Score Card (BSC) adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perikanan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) IK sebagai berikut :

IK 1 : Nilai PNBP LPTK (rupiah juta)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar Hukum Pengelolaan PNBP diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai PNBP LPTK sebesar 0,0033 rupiah milyar. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah PNBP LPTK sebesar Rp. 1.626.470,- yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (hasil sewa rumah negara mess pegawai LPTK).

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 2 : Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup UPT LPTK diantaranya : Tenaga kerja yang terlibat pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT.

Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang

Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah jumlah Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPTK LPTK adalah sebanyak 15 orang. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah penyusunan RAB, analisa usaha untuk kegiatan SFV sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program SFV tahun 2024 dari BPPSDMKP. LPTK sudah melakukan survey, koordinasi dan identifikasi terkait kelompok pembudidaya yang akan terlibat dalam kegiatan SFV serta nelayan yang akan menerima WakatobiAIS dengan melibatkan penyuluh perikanan setempat.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 3 : Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)

Kerjasama adalah penyelenggaraan kerjasama antara LPTK dengan pihak mitra pada Tahun 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sedangkan Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerjasama, Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah 1 (satu) buah naskah kerjasama. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah mempersiapkan draft perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara LPTK dan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Kendari BMKG mengingat PKS sebelumnya telah berakhir pada tahun 2023.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.220.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari 4 (empat) RO antara lain: 1)Layanan BMN, 2)Layanan Umum , 3)Layanan Perkantoran, dan 4)Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IK 4 pada Triwulan I Tahun 2024

IK-4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)						
	TW I 2023			TARGET 2024	TW I 2024		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	100	100	100%	100	100	100%	

Pada triwulan I tahun 2024 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100% dari target 100%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah dikumpulkan yakni tersedianya semua laporan kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024. Realisasi capaian ini sama apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Capaian ini juga sama dengan target tahunan 2024 yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan capaian IK ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antar ketua tim kerja, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LPTK berupa 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Rincian Output, yakni: laporan layanan BMN (1 laporan), laporan Layanan Umum (1 laporan), laporan Layanan Perkantoran (1 laporan), dan laporan Penyelenggaraan Kearsipan (1 laporan).

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah kegiatan pengorganisasian atau tata laksana di dalam layanan dukungan manajemen internal meliputi pengelolaan BMN, layanan umum, perkantoran, kearsipan dan lainnya. Serta adanya pendokumentasian kegiatan pada seluruh layanan dukungan manajemen internal tersebut.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.371.013.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.768.832.344,- atau sebesar 17,59%.

IK 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Loka Perakayasaan Teknologi Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Loka Perakayasaan Teknologi Kelautan tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK sebesar $\leq 0,5\%$. IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan saat ini adalah

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.34.790.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.18.898.544,- atau sebesar 54,32%.

IK 6 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup LPTK merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel . Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

No.	Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh PNS (bobot)					
				S3	S2	S1/ D-IV	D-III	D-II/D-I/ SMA/ Sederajat	Dibawah SLTA
1.	Kualifikasi	JPT	S1 / D-IV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrasi	S1 / D-IV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	D-III	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	D-III	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1 / D-IV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pelaksana	S2	25	20	15	10	5	1
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

Tabel . Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

Dimensi	Jenjang Jabatan	Pengembangan Kompetensi yang Diikuti (bobot)							
		Pelatihan Struktural Kepemimpinan		Pelatihan Fungsional		Pelatihan Teknis		Seminar/Konferensi/Sarasehan/Workshop/Lokakarya/Sejenisny	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	<20 JP	Sudah	Belum
Kualifikasi	JPT	15				15	Proporsional	10	-
	Jabatan Administrasi	15				15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pengawas	15				15	Proporsional	10	-
	Jabatan Fungsional	-		15		15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-				15	Proporsional	17,5	-

Tabel . Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel . Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR		BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB	
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukum Disiplin		5		
	1	Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5	
	2	Pernah Dikenai Hukuman Disiplin			
		a.		Ringan	3
		b.		Sedang	2
		c.		Berat	1

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 82. Adapun pengukuran IK ini akan dilakukan pada triwulan II dan IV tahun 2024 atau periode semesteran. Adapun progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah nilai IP ASN LPTK sebesar 72,69 yang dihitung dari 8 pegawai PNS LPTK.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.8.157.696,- atau sebesar 32,63%.

IK 7 : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian IK ini diukur dengan periode pelaporan tahunan. Target capaian IK ini pada tahun 2024 adalah nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK adalah sebesar 79. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan saat ini adalah inventarisasi dokumen-dokumen SAKIP selama periode 5 tahun (2010-2024) meliputi dokumen perencanaan, pelaporan, kinerja serta dokumen lainnya untuk persiapan penilaian mandiri SAKIP tahun 2024.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.716.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu :

- a. Aspek Kepatuhan (A-I: Bobot 25) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b. Aspek Kesesuaian (A-II: Bobot 25) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- c. Aspek Ketercapaian (A-III: Bobot 30) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku
- d. Aspek Ketepatan (A-IV: Bobot 20): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ kepada atasan dan upload di Aplikasi e-SakipReviu (ESR). Dokumen yang dibutuhkan adalah Memo/Surat Pengantar penyampaian LKJ level 3 tahunan.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK sebesar 94. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah penyusunan dokumen kinerja LPTK tahun 2024 meliputi Manual Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Rincian Target Kinerja serta LKj triwulan I tahun 2024. Nilai kinerja LPTK pada triwulan I tahun 2024 sebesar 106,66%.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.004.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 9 : Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui situs portal.kkp.go.id

Komponen Keaktifan terdapat 3 kategori:

1. Kegiatan ini mencakup pengunggahan dokumentasi kegiatan atau informasi yang dilengkapi dengan foto atau video, yang dilakukan oleh Kepala LPTKI dan Ketua Tim Kerja. Selain itu, notulensi hasil rapat yang memenuhi kriteria untuk dapat dipublikasikan serta presentasi rapat dalam bentuk PPT terkait kegiatan prioritas yang mengandung informasi 5W1H juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ini.
2. Infografis merupakan sekumpulan visualisasi, grafik, dan sedikit teks yang disusun secara rapi untuk memudahkan pemahaman audiens terhadap suatu topik.
3. Video, karya tulis, jurnal, atau hasil penelitian yang terkait dengan Kementerian atau Lembaga juga merupakan bagian dari kegiatan ini, termasuk infografis, video, atau kampanye terkait.

Metode Pengukuran:

1. Utilisasi Aplikasi portal.kkp.go.id merupakan sarana utama untuk melakukan pengukuran.
2. Pengukuran dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi akan direkapitulasi setiap harinya dalam satu triwulan.
4. Evaluasi keaktifan akan dilaksanakan setiap hari dalam satu triwulan dengan memastikan bahwa setiap peserta memperoleh minimal empat poin unggahan keaktifan sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan:
 - a. Pengunggahan dokumentasi kegiatan rapat / seminar / workshop / diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H (0,5 poin).
 - b. Infografis adalah representasi visual dari informasi atau data kompleks, menggunakan gabungan gambar, grafik, teks, dan elemen visual lainnya (1 poin).
 - c. Konten yang meliputi karya tulis, jurnal, dan video/campaign yang memiliki orientasi edukatif atau mengajak untuk bertindak (3 poin).

- Proses pembobotan melibatkan beberapa aspek, termasuk evaluasi Level II yang mempertimbangkan jumlah keaktifan dari Kepala LPTK dan Ketua Tim Kerja.

Pusdatin bertanggung jawab untuk menyajikan data hasil rekapitulasi dari pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan. Data ini akan diolah dan dijadikan sebagai nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing unit kerja eselon IV.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah sebesar 94%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 . Capaian Kinerja IK 9 pada triwulan I Tahun 2024

IK-9	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)					
	TW I 2023			TARGET 2024	TW I 2024	
TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET		TARGET	REALISASI
92	100	108.70%	100	94	133.33	120%

Pada triwulan I tahun 2024 capaian IK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni persentase unit kerja LPTK yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 133,33% dari target 94%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 108,70%. Capaian ini berdasarkan surat BPPSDM/KP.540/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Capaian IKU MP TW I Satker UPT lingkup PusrisKel.

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi atau media sosial dalam penyampaian informasi, berita, postingan kegiatan yang dilakukan oleh Plt. Kepala LPTK pada Aplikasi Collaboration Office

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini adalah keaktifan Kepala Satker dalam membagikan/mengupload kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK pada aplikasi tersebut, sehingga diperoleh point maksimal.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.450.000,- atau sebesar 30,00%.

IK 10 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh LPTK.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2024 ditetapkan target IK ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 82%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja IK 10 pada triwulan I Tahun 2024

IK-10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)					
	TW I 2023			TARGET 2024	TW I 2024	
TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET 2024		TARGET	REALISASI
75	75	100%	100	82	82	100%

Pada triwulan I tahun 2024 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 82% dari target 82%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Presentase capaian IK ini sama apabila dibandingkan dengan presentase capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yakni 100%. Capaian ini berdasarkan Surat dari BPPSDMKP Nomor B.3334/BPPSDMKP.1/KU.520/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024 Lingkup BPPSDM KP”

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas. Tercapaiannya IK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan temuan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.484.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 11 : **Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi:

1. Memiliki kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat ditransfer/direplikasi
5. Keberlanjutan

Kelompok Inovasi:

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Replikasi
3. Kelompok Khusus

Persyaratan Inovasi:

1. Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
2. Memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB;
3. Relevan dengan salah satu kategori KIPP;
4. Diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan (setelah dinyatakan lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Internal KKP);
5. Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan;
6. Relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan
7. Telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi, dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan sebanyak 1 (satu) buah Proposal. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah LPTK telah mengirimkan usulan proposal inovasi layanan publik dengan judul “SFV-MarInfo” kepada Sekretariat BPPSDMKP pada 1 Februari 2024.

IK 12 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik,

apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ <p>1. Revisi DIPA - Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{n=1}^n RRev_n}{n}$	<p>2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) - Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RDP sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RDP, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai : $DevDIPA BPeg = \frac{[RBPeg_n - RPD BPeg_n]}{RPD BPeg_n} \times 100$</p> <p>Belanja Barang : $DevDIPA BBar = \frac{[RBBar_n - RPD BBar_n]}{RPD BBar_n} \times 100$</p> <p>Belanja Modal : $DevDIPA BMod = \frac{[RBMod_n - RPD BMod_n]}{RPD BMod_n} \times 100$</p> <p>Seluruh Jenis Belanja : $DevDIPA s = \frac{[DevDIPA BPeg + DevDIPA BBar + DevDIPA BMod]}{3}$</p>
---	---

Nilai IKPA diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai IKPA LPTK sebesar 93,76. Capaian IK ini akan dikur pada triwulan II dan IV tahun 2024 atau periode semesteran. Adapun progres sampai saat ini adalah melakukan pengelolaan UP, pendaftaran kontrak, revisi halaman III DIPA.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.31.640.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.8.719.779,- atau sebesar 27,56%.

IK 13 : Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam

dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila = 50.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai kinerja anggaran LPTK sebesar 82. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan realisasi output kegiatan agar dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.141.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.9.175.880,- atau sebesar 90,48%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran tahun 2024 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp. 4.523.513.000,- (*Empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 814.234.243,- (*Delapan ratus juta duaratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) atau sebesar 18,00%. Adapun Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA adalah target realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 857.132.000,- (*Delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Dengan demikian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I telah mencapai 95% dari RPD. Pagu dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 berdasarkan Rincian Output (RO) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per RO triwulan I tahun 2024

NO	RINCIAN OUTPUT	VOLUME	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN I	(%)
1	2378.EBA.956 LAYANAN BMN	1 Layanan	10.000.000	-	0,00
2	2378.EBA.958 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	20.225.000	-	0,00
3	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	133.275.000	20.553.781	15,42
4	2378.EBA.963 LAYANAN DATA DAN INFORMASI	1 Layanan	1.500.000	450.000	30,00
5	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	4.163.513.000	748.278.563	17,97
6	2378.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	9 Layanan	25.000.000	8.157.696	32,63
7	2378.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1 Layanan	31.640.000	8.719.779	27,56
8	2378.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Layanan	39.345.000	9.175.880	23,32
9	2378.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Layanan	34.790.000	18.898.544	54,32
10	2378.EBD.974 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1 Layanan	64.225.000	-	0,00
Total			4.523.513.000	814.234.243	18,00

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan I Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN I	(%)	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0	1.500.000	-	0,00
	2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15	750.000	-	
	3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1	10.220.000	-	0,00
	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	4.371.013.000	768.832.344	17,59
	5	Persentase Penyelesaian Temuan BPK LPTK (%)	0,5	34.790.000	18.898.544	54,32
	6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82	25.000.000	8.157.696	32,63
	7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79	10.716.000	-	0,00
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94	10.004.000	-	0,00
	9	Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	1.500.000	450.000	30,00
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	8.484.000	-	0,00
	11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1	7.755.000	-	0,00
	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76	31.640.000	8.719.779	27,56
	13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82	10.141.000	9.175.880	90,48
TOTAL			4.523.513.000	814.234.243	18,00	

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2024 IK yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA UTAMA

4.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4.1. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan I tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi Kinerjaaku, secara keseluruhan kinerja LPTK Wakatobi termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 166,66% Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan NKO triwulan I tahun 2023 yang bernilai sebesar 103,26%. Pengukuran ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja Loka Perekayasaan Teknologi pada triwulan I tahun 2024, telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Pada triwulan I tahun 2024, terdapat 3 Indikator Kinerja (IK) yang mempunyai target capaian pada periode tersebut dari total 13 IK yang ditetapkan pada tahun 2024. Ketiga capaian IK tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan berstatus baik $\geq 100\%$. Rincian target dan realisasi dari 3 IK tersebut adalah:

1. IK 4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau persentase capaian sama dengan 100%
2. IK 9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan target sebesar 94% dengan capaian sebesar 133,33% atau persentase capaian sama dengan 120%
3. IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 82% dengan capaian sebesar 82% atau persentase capaian sama dengan 100%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN I		%
					TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033			
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15			
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0.5			
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82			
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79			
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94			
		9	Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	82	82	100,00
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1			
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76			
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Secara umum, pencapaian kinerja LPTK adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang semuanya tercapai, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 814.234.243,- dari pagu anggaran Rp. 4.523.513.000,- atau sebesar 18,00%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

A. Permasalahan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan perekayasaan teknologi kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga unit kerja ex riset belum ada kejelasan tugas dan fungsi organisasi sejak triwulan III tahun 2022 sampai dengan saat ini sehingga unit kerja ex riset pada tahun 2022 – 2024 hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja manajerial.
2. Terdapat kerusakan dak bangunan pada lantai 2 gedung utama LPTK, kerusakan ini disebabkan oleh terjadi perembesan air hujan pada dak yang menyebabkan tulangan dan beton menjadi lapuk sehingga plafon pada lantai 2 tidak bisa bertahan lama walaupun telah diganti. hal ini tentunya mengganggu kinerja layanan LPTK mengingat ruangan rapat dan ruangan radar berada pada lantai 2.

B. Rekomendasi

1. Mulai tahun 2024 dalam masa transisi ini setelah terbentuknya organisasi baru di lingkungan eselon II BPPSMKP yang semula LPTK dalam koordinasi Pusat Riset Kelautan kini LPTK dalam koordinasi langsung oleh Sekretariat BPPSDMKP, walaupun masih menjalankan kegiatan manajerial namun LPTK pada tahun 2024 mendapatkan kegiatan SFV UPT. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan dapat memacu LPTK dalam berpartisipasi mewujudkan prioritas pembangunan kelautan perikanan;
2. Perlu direncanakan untuk dilakukan rehab total pada dak lantai 2 karena kondisi konstruksi beton dan tulangan sudah lapuk mengingat bangunan sudah berumur 14 tahun agar tidak membahayakan pegawai LPTK dan tamu yang berkunjung ke LPTK.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.lkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	4.523.513.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2023		4.523.513.000

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perencanaan
Teknologi Kelautan



Aliruddin

